

Analisis Pengaruh Dana Desa, Indeks Demokrasi Indonesia, dan Persepsi Korupsi terhadap Kemiskinan di Indonesia

Mei Sarah Andriani Tobing^{1*}, Indra Maipita²

Universitas Negeri Medan^{1,2}

meisarahtobing05gmail.com¹, imaipita@unimed.ac.id²

*Corresponding Author

Histori Naskah:

Submit: 01-02-2026

Accepted: 25-03-2026

Published: 30-03-2026



This is an Creative Commons License This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License

Abstrak:

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh Dana Desa, Indeks Demokrasi Indonesia (IDI), dan Indeks Persepsi Korupsi (IPK) terhadap kemiskinan di Indonesia periode 2008–2024 dengan menggunakan pendekatan *Error Correction Model* (ECM). Penelitian ini menggunakan data sekunder berbentuk time series yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS), Kementerian Keuangan, dan Transparency International. Metode ECM dipilih karena mampu mengidentifikasi hubungan jangka pendek sekaligus keseimbangan jangka panjang antar variabel penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dana Desa berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang, dengan pengaruh yang lebih kuat dalam jangka panjang melalui pembangunan infrastruktur desa, peningkatan layanan dasar, dan penguatan kapasitas ekonomi masyarakat. Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) berpengaruh negatif dan signifikan dalam jangka pendek, namun tidak signifikan dalam jangka panjang, yang mengindikasikan bahwa kualitas demokrasi di Indonesia masih bersifat prosedural dan belum sepenuhnya memberikan dampak berkelanjutan terhadap pengurangan kemiskinan. Sementara itu, Indeks Persepsi Korupsi (IPK) tidak berpengaruh signifikan dalam jangka pendek, tetapi berpengaruh positif dan signifikan dalam jangka panjang, yang menunjukkan bahwa korupsi memiliki dampak kumulatif yang memperburuk kemiskinan secara struktural melalui kebocoran anggaran dan rendahnya efektivitas kebijakan publik. Secara simultan, ketiga variabel berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan, yang menegaskan bahwa kemiskinan merupakan fenomena multidimensional yang dipengaruhi oleh faktor ekonomi, politik, dan tata kelola. Oleh karena itu, diperlukan penguatan tata kelola Dana Desa, peningkatan kualitas demokrasi yang lebih substantif, serta pemberantasan korupsi secara sistemik guna mendukung pengentasan kemiskinan yang berkelanjutan di Indonesia.

Kata kunci: Dana Desa, *Error Correction Model*, Indeks Demokrasi Indonesia, Indeks Persepsi Korupsi, Kemiskinan

Pendahuluan

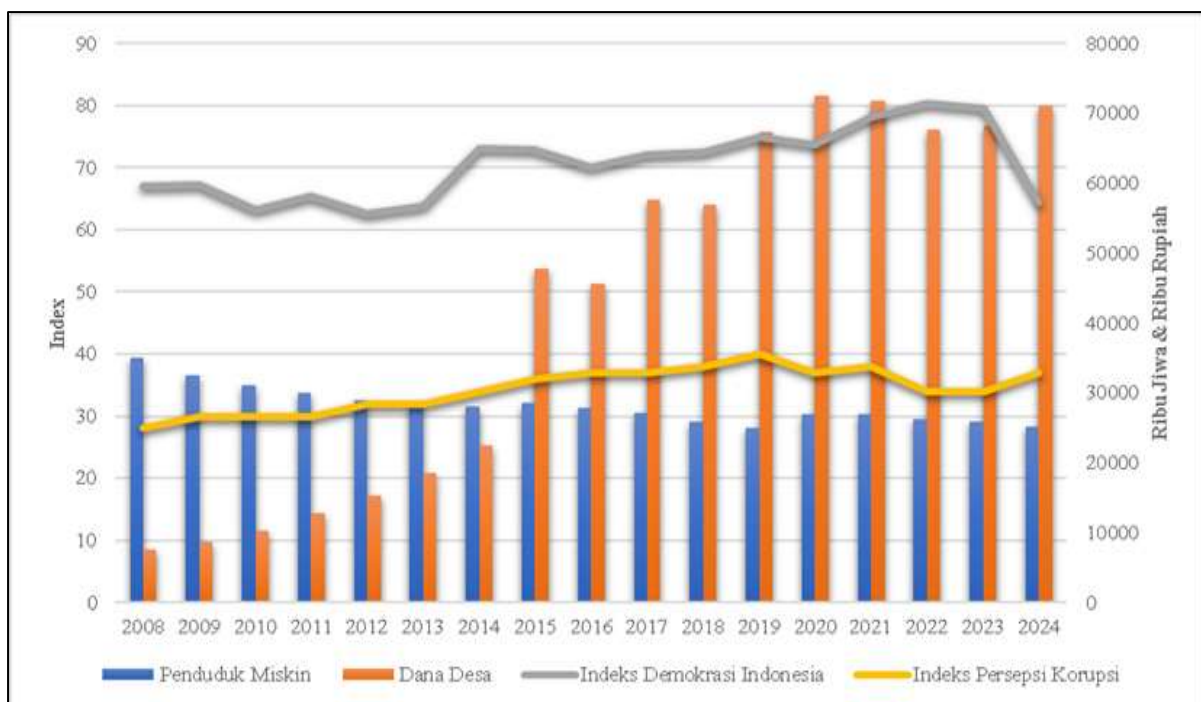
Kemiskinan masih menjadi permasalahan kompleks dan multidimensional yang dihadapi Indonesia hingga saat ini (Badan Pusat Statistik, 2024b). Meskipun berbagai kebijakan telah diimplementasikan, jumlah penduduk miskin tetap menjadi perhatian utama dalam pembangunan nasional.

Hal ini disebabkan oleh penyebaran kemiskinan yang merata di perkotaan maupun perdesaan dengan karakteristik dan faktor penyebab yang beragam. Menurut Badan Pusat Statistik (2024a), penduduk miskin didefinisikan sebagai mereka yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan, yang mencakup kebutuhan minimum makanan dan non-makanan untuk hidup layak.

Dalam rangka mengatasi kemiskinan, Pemerintah Indonesia telah meluncurkan berbagai kebijakan pengentasan kemiskinan, salah satunya adalah Dana Desa. Program ini bertujuan untuk meningkatkan pembangunan infrastruktur dan pemberdayaan ekonomi masyarakat lokal. Namun demikian, efektivitas Dana Desa dalam menurunkan kemiskinan masih menjadi perdebatan karena seringkali terkendala oleh lemahnya tata kelola dan akuntabilitas di tingkat lokal.

Di sisi lain, kualitas demokrasi yang diukur melalui Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) dan tingkat korupsi yang direpresentasikan oleh Indeks Persepsi Korupsi (IPK) diduga memiliki hubungan erat dengan keberhasilan kebijakan pro-masyarakat miskin. Demokrasi yang sehat seharusnya mendorong partisipasi dan transparansi, sementara korupsi yang tinggi dapat menghambat alokasi sumber daya publik secara efisien.

Dalam rangka memahami kondisi kemiskinan di Indonesia, dana desa, indeks demokrasi Indonesia, dan indeks persepsi korupsi dapat dilihat pada gambar di bawah ini:



Gambar 1 Kondisi Keseluruhan
Sumber: Pengolahan Mandiri

Data penduduk miskin Indonesia menunjukkan permasalahan struktural yang kompleks. Angka kemiskinan mencapai 34,96 juta jiwa pada 2008 akibat krisis finansial global yang menghancurkan daya beli masyarakat. Periode 2009-2012 menunjukkan pemulihan dengan penurunan kemiskinan menjadi 28,86 juta jiwa melalui implementasi "triple track strategy" (Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, 2020). Sementara itu, data Dana Desa memperlihatkan dinamika alokasi yang fluktuatif.

Selain itu, dana desa masih rendah pada 2008 (Rp7,63 triliun), kemudian meningkat bertahap hingga Rp15,29 triliun pada 2012. Lonjakan signifikan terjadi pada 2015 menjadi Rp47,83 triliun akibat UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa (Kementerian Keuangan, 2020). Periode 2017-2019 stabil di kisaran Rp57-67 triliun dengan digitalisasi sistem keuangan desa (Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, 2021). Pada 2020, dana desa melonjak ke Rp72,42 triliun karena pandemi COVID-19 untuk bantuan tunai dan program padat karya (Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah, 2020).

Selanjutnya, Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) menunjukkan dinamika yang tidak stabil. IDI turun tajam dari 67 (2008) menjadi 63,17 pada 2010 akibat menurunnya kebebasan sipil. Pada 2014 terjadi lonjakan ke 73,04 karena pemilu yang partisipatif. Periode 2017-2022 mencapai puncak 80,41 pada 2022, namun melemah menjadi 79,51 (2023) dan turun drastis ke 64,44 pada 2024 akibat pembatasan kebebasan berpendapat (Freedom House, 2024) dan maraknya politik transaksional (Badan Pusat Statistik, 2025).

Sementara itu, Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia sejak 2008 menunjukkan perbaikan yang lambat. Skor IPK masih 28 pada 2008, naik bertahap menjadi 40 pada 2019. Namun pada 2020 menurun menjadi 37 akibat melemahnya independensi lembaga penegak hukum. Penurunan lebih tajam terjadi pada 2022-2023 hingga angka 34 karena revisi regulasi yang melemahkan kewenangan KPK (Transparency International, 2020). Pada 2024, IPK naik kembali ke 37, namun masalah korupsi di Indonesia bersifat struktural dan sistemik (ACLC KPK, 2022).

Berdasarkan kompleksitas hubungan tersebut, penelitian ini menggunakan pendekatan *Error Correction Model* (ECM) untuk menganalisis pengaruh jangka pendek dan jangka panjang antara variabel Dana Desa, Indeks Demokrasi Indonesia, dan Indeks Persepsi Korupsi terhadap jumlah penduduk miskin. Metode ECM dipilih karena mampu menangkap dinamika penyesuaian keseimbangan dalam jangka panjang sekaligus fluktuasi jangka pendek.

Berdasarkan uraian tersebut, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana pengaruh Dana Desa, Indeks Demokrasi Indonesia, dan Indeks Persepsi Korupsi terhadap jumlah penduduk miskin di Indonesia, baik secara parsial maupun simultan dalam jangka pendek dan jangka panjang. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh masing-masing variabel serta pengaruh simultan ketiganya terhadap kemiskinan.

Studi Literatur

Kemiskinan

Kemiskinan merupakan fenomena kompleks yang menjadi perhatian utama dalam pembangunan ekonomi dan sosial di seluruh dunia. Kemiskinan dikatakan sebagai ketidakmampuan untuk mencapai standar hidup minimum yang diukur melalui pendapatan atau konsumsi per kapita yang berada di bawah garis kemiskinan tertentu (World Bank, 2018). Sementara itu, kemiskinan merupakan ketidakmampuan memenuhi standar minimum kebutuhan dasar yang meliputi kebutuhan makanan maupun non-makanan (Badan Pusat Statistik, 2020). Dengan demikian, kemiskinan tidak hanya berkaitan dengan rendahnya pendapatan, tetapi juga mencakup keterbatasan dalam memenuhi kebutuhan dasar yang esensial bagi kehidupan.

Kemiskinan dipengaruhi beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi kemiskinan adalah sebagai berikut (UNDP, 2019). Pertama, faktor perumahan dan infrastruktur merupakan faktor utama yang mempengaruhi kemiskinan menurut BPS. Kriteria ini meliputi luas lantai bangunan tempat tinggal kurang dari 8 m² per orang, jenis lantai tempat tinggal terbuat dari tanah, bambu, atau kayu murahan, serta jenis dinding tempat tinggal dari bambu, rumbia, kayu berkualitas rendah, atau tembok tanpa diplester. Kedua, faktor konsumsi dan pola hidup juga menjadi indikator penting dalam analisis kemiskinan BPS.

Kriteria ini mencakup penggunaan bahan bakar untuk memasak sehari-hari berupa kayu bakar, arang, atau minyak tanah, konsumsi daging, susu, atau ayam hanya satu kali dalam seminggu, serta kemampuan membeli pakaian baru hanya satu stel dalam setahun. Ketiga, kedua faktor tersebut saling berkaitan dalam menggambarkan kondisi kemiskinan secara lebih menyeluruh, baik dari sisi kondisi tempat tinggal maupun kemampuan konsumsi dan pemenuhan kebutuhan dasar rumah tangga.

Dalam rangka mengukur variabel ini, variabel penduduk miskin diukur menggunakan beberapa indikator, yaitu garis kemiskinan yang terdiri atas garis kemiskinan makanan dan garis kemiskinan non-makanan, *head count index*, *poverty gap index* (P1) atau indeks kedalaman kemiskinan, serta *poverty severity index* (P2) atau indeks keparahan kemiskinan. Satuan yang digunakan adalah juta jiwa, dengan sumber data berasal dari Badan Pusat Statistik (Badan Pusat Statistik, 2020).

Dana Desa

Dana Desa adalah dana yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang disalurkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kabupaten/kota untuk mendukung pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di desa (Afifi & Singandaru, 2024). Dana ini digunakan untuk berbagai kegiatan, seperti menjalankan pemerintahan desa, membangun fasilitas desa, membina masyarakat, dan meningkatkan kesejahteraan warga. Tujuan utama Dana Desa adalah untuk memperkuat kemandirian desa dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan memberikan kewenangan kepada pemerintah desa dalam mengelola dana sesuai kebutuhan dan potensi daerahnya (Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, 2020).

Dana Desa dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu kondisi geografis wilayah seperti luas, akses, dan tingkat kesulitan desa yang membuat desa terpencil biasanya mendapat dana lebih besar. Selain itu, faktor kemampuan pengelolaan dan kelembagaan desa juga berpengaruh, termasuk kemampuan perangkat desa dalam mengelola keuangan, peran lembaga desa, serta partisipasi masyarakat. Keterbukaan dan pengawasan juga penting agar Dana Desa digunakan secara efektif dan tepat sasaran (Afifi & Singandaru, 2024).

Berdasarkan penelitian terdahulu, pengukuran dana desa dapat dilakukan melalui beberapa indikator. Menurut Halim & Taryani (2023), komponen yang digunakan sebagai indikator dana desa meliputi Dana Bagi Hasil Pajak, Dana Bagi Hasil Retribusi, Dana Perimbangan, Bantuan Keuangan, Hibah, serta Sumbangan Pihak Ketiga.

Indeks Demokrasi Indonesia

Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) merupakan instrumen pengukuran yang digunakan untuk mengevaluasi kualitas demokrasi di Indonesia secara kuantitatif dan komprehensif. IDI pertama kali diperkenalkan pada tahun 2009 melalui kerja sama antara Badan Pusat Statistik (BPS), United Nations Development Programme (UNDP), dan Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. Indeks ini dikembangkan sebagai alat ukur untuk menggambarkan kondisi demokrasi secara objektif dan terukur, sejalan dengan perkembangan demokrasi di Indonesia sejak era reformasi tahun 1998. IDI dinyatakan dalam skala 0–100, di mana semakin tinggi nilainya menunjukkan semakin baik kualitas demokrasi di suatu wilayah (Badan Pusat Statistik, 2025).

Menurut Kementerian Dalam Negeri (2020), terdapat berbagai faktor yang memengaruhi tingkat Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) yang saling berinteraksi dalam membentuk kualitas demokrasi di Indonesia. Faktor tersebut meliputi aspek sosial-ekonomi, budaya dan sosial, serta kelembagaan dan hukum. Dari sisi sosial-ekonomi, tingkat pendidikan masyarakat menjadi hal penting karena semakin tinggi pendidikan, semakin tinggi pula kesadaran politik dan partisipasi dalam demokrasi. Selanjutnya, faktor budaya dan sosial juga berpengaruh karena keberagaman suku, agama, dan budaya di Indonesia menciptakan dinamika tersendiri dalam praktik demokrasi.

Selain itu, faktor kelembagaan dan hukum menjadi dasar utama dalam pelaksanaan demokrasi, di mana kualitas institusi negara seperti sistem peradilan yang independen, birokrasi yang profesional, dan lembaga pengawas yang efektif sangat menentukan kualitas demokrasi secara keseluruhan.

Menurut Badan Pusat Statistik, Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) diukur melalui tiga dimensi utama. Pertama, dimensi kebebasan sipil yang mencakup kebebasan berkumpul dan berserikat, berpendapat, berkeyakinan, serta bebas dari diskriminasi. Kedua, dimensi hak-hak politik yang berkaitan dengan partisipasi masyarakat dalam demokrasi, seperti hak memilih, hak dipilih, kebebasan berpolitik, dan akses terhadap jabatan publik. Ketiga, dimensi lembaga demokrasi yang menilai kualitas dan kinerja institusi demokrasi, termasuk efektivitas pemerintahan dan akuntabilitas lembaga negara (Badan Pusat Statistik, 2025).

Indeks Persepsi Korupsi

Indeks Persepsi Korupsi (*Corruption Perceptions Index/CPI*) adalah instrumen yang dikembangkan oleh Transparency International sejak 1995 untuk mengukur tingkat persepsi korupsi di sektor publik berbagai negara. CPI merupakan indeks komposit yang disusun berdasarkan penilaian ahli dan survei pelaku usaha mengenai persepsi korupsi pada pejabat publik dan politisi. Indeks ini menggunakan skala 0–100, di mana 0 menunjukkan tingkat korupsi sangat tinggi dan 100 menunjukkan tingkat korupsi sangat rendah. CPI tidak mengukur korupsi secara langsung, melainkan persepsinya, karena korupsi bersifat tersembunyi dan sulit diukur secara objektif (Transparency International, 2020).

Menurut Transparency International (2020), terdapat berbagai faktor yang memengaruhi tinggi rendahnya Indeks Persepsi Korupsi (CPI) suatu negara, yang dapat dikelompokkan menjadi faktor struktural, institusional, dan kultural. Pertama, faktor struktural berkaitan dengan tingkat pembangunan ekonomi. Negara dengan pendapatan rendah cenderung memiliki tingkat korupsi yang lebih tinggi, salah satunya karena rendahnya gaji pegawai negeri yang dapat mendorong praktik korupsi sebagai tambahan penghasilan. Kedua, faktor institusional mencakup kualitas lembaga pemerintahan, sistem checks and balances, independensi lembaga pengawas, serta efektivitas sistem hukum dalam menegakkan aturan. Ketiga, faktor kultural meliputi norma sosial, nilai budaya, tingkat kepercayaan masyarakat, serta tingkat toleransi masyarakat terhadap praktik korupsi.

Indeks Persepsi Korupsi (CPI) terdiri dari tiga dimensi utama menurut ACLC KPK (2022). Pertama, dimensi ekonomi dan investasi yang mengukur persepsi korupsi dalam aktivitas ekonomi, seperti perizinan usaha, pengadaan publik, regulasi bisnis, dan kebijakan investasi. Kedua, dimensi penegakan hukum yang menilai persepsi korupsi dalam sistem peradilan serta lembaga penegak hukum. Ketiga, dimensi politik dan demokrasi yang mengukur persepsi korupsi dalam proses politik.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan analisis ekonometrika untuk menganalisis pengaruh Dana Desa, Indeks Demokrasi Indonesia (IDI), dan Indeks Persepsi Korupsi (IPK) terhadap jumlah penduduk miskin di Indonesia. Data yang digunakan merupakan data sekunder berbentuk time series pada periode 2008–2024 yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS), Kementerian Keuangan, dan Transparency International Indonesia. Metode analisis yang digunakan adalah *Error Correction Model* (ECM) dengan bantuan software EViews 12 untuk melihat pengaruh jangka pendek dan jangka panjang antar variabel. Sesuai dengan Basuki (2015), tahapan analisis dimulai dengan uji stasioneritas menggunakan Augmented Dickey-Fuller (ADF) dan Phillips-Perron (PP). Selanjutnya dilakukan uji kointegrasi Engle-Granger untuk mengetahui hubungan jangka panjang antar variabel, kemudian dilanjutkan dengan estimasi model ECM.

Model Koreksi Kesalahan (ECM)

Model *Error Correction Model* digunakan untuk mengintegrasikan persamaan regresi yang menggambarkan hubungan dalam jangka pendek dan jangka panjang sekaligus serta memeriksa kesesuaian model. Berikut adalah model regresi yang digunakan:

Persamaan Jangka Panjang: $JPM_t = \beta_0 - \beta_1DD_t + \beta_2IDI_t + \beta_3IPK_t + e_t$

Keterangan:

- JPM = Variabel dependen (Jumlah Penduduk Miskin)
- β_0 = Intercept atau Konstanta
- $\beta_1, \beta_2, \beta_3$ = Koefisien
- DD = Variabel independen (Dana Desa)
- IDI = Variabel independen (Indeks Demokrasi Indonesia)
- IPK = Variabel independen (Indeks Persepsi Korupsi)
- e = error term
- t = Periode

Persamaan Jangka Pendek: $\Delta JPM_t = \beta_0 - \beta_1\Delta DD_t - \beta_2\Delta IDI_t - \beta_3\Delta IPK_t + \beta_4ECT_{t-1} + e_t$

Keterangan:

- Δ = Delta Jumlah Penduduk Miskin
- ECT_{t-1} = Nilai residual dari persamaan yang memiliki time-lag satu periode

Uji asumsi klasik yang digunakan dalam penelitian ini meliputi uji normalitas, uji multikolinearitas dengan kriteria Variance Inflation Factor ($VIF < 10$), uji heteroskedastisitas, serta uji autokorelasi dengan tingkat signifikansi 5% (Basuki, 2015). Pengujian hipotesis dilakukan melalui uji t untuk menguji pengaruh parsial masing-masing variabel, uji F untuk menguji pengaruh simultan, serta koefisien determinasi (R^2) untuk mengukur kemampuan model dalam menjelaskan variasi variabel dependen. Seluruh pengujian dalam penelitian ini menggunakan tingkat signifikansi $\alpha = 0,05$ (Basuki, 2015).

Hasil

Penelitian ini menggunakan metode Error Correction Model (ECM) dan telah memenuhi seluruh uji prasyarat, meliputi uji stasioneritas, kointegrasi, serta uji asumsi klasik (normalitas, heteroskedastisitas, multikolinearitas, dan autokorelasi). Hasil pengujian menunjukkan bahwa seluruh variabel telah stasioner pada tingkat first difference dan terdapat hubungan jangka panjang antar variabel, sehingga model ECM layak untuk digunakan dalam analisis.

Hasil Estimasi Jangka Pendek

Hasil estimasi jangka pendek menunjukkan bahwa model memiliki kemampuan penjelasan yang cukup baik dengan nilai R-squared sebesar 0,582711, yang berarti 58,27% variasi kemiskinan dapat dijelaskan oleh variabel independen dalam model. Hasil estimasi dapat dilihat dibawah tabel ini.

Tabel 1 Hasil Estimasi Jangka Pendek

Variabel	Coefficient	Std. Error	t- statistic	Prob
C	-0.017861	0.009412	-1.897599	0.0843
D(LOG(DD))	-0.016854	0.047176	-3.357253	0.0077
D(IDI)	-0.010174	0.001542	-3.112670	0.0003
D(IPK)	0.008533	0.004310	1.979884	0.0733
ECT(-1)	-0.477193	0.233714	-5.041784	0.0059
R-squared	0.582711	Mean dependent var		-0.020399
Adjusted R-squared	0.574605	S.D. dependent var		0.033717
S.E of regression	0.028319	Akaike info criterion		-4.040296
Sum squared resid	0.008821	Schwarz criterion		-3.798862
Log likelihood	37.32237	Hanna-Quinn criter		-4.027933
F-statistic	5.566173	Durbin-Watson stat		1.391152
Prob (F-Statistic)	0.000367			

Sumber: Data Pengolahan Mandiri

Hasil estimasi jangka pendek menunjukkan bahwa Dana Desa (DD) dan Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan, sedangkan Indeks Persepsi Korupsi (IPK) berpengaruh positif namun tidak signifikan. Koefisien Dana Desa sebesar $-0,016854$ menunjukkan bahwa peningkatan Dana Desa mampu menurunkan kemiskinan melalui dampak langsung seperti program padat karya, pembangunan infrastruktur desa, dan peningkatan aktivitas ekonomi lokal. Sementara itu, IDI dengan koefisien $-0,010174$ mengindikasikan bahwa peningkatan kualitas demokrasi mendorong kebijakan yang lebih responsif terhadap pengentasan kemiskinan. Adapun IPK yang bernilai positif namun tidak signifikan menunjukkan bahwa dampak korupsi terhadap kemiskinan belum terlihat secara kuat dalam jangka pendek. Hasil Estimasi Jangka Panjang

Hasil Estimasi Jangka Panjang

Hasil estimasi jangka panjang menunjukkan bahwa model memiliki daya jelaskan yang sangat baik dengan R-squared sebesar $0,846764$, yang berarti $84,67\%$ variasi kemiskinan dapat dijelaskan oleh variabel independen dalam jangka panjang. Hasil estimasi dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 2 Hasil Estimasi Jangka Panjang

Variabel	Coefficient	Std. Error	t- statistic	Prob
C	12.60297	0.521602	24.16206	0.0000
LOG(DD)	-0.102691	0.033862	-3.032607	0.0096
IDI	-0.002999	0.002543	-1.179150	0.2595
IPK	0.102505	0.026887	3.363668	0.0020
R-squared	0.846764	Mean dependent var		10.24381
Adjusted R-squared	0.811402	S.D. dependent var		0.091152
S.E of regression	0.039585	Akaike info criterion		-3.418386
Sum squared resid	0.020371	Schwarz criterion		-3.222336
Log likelihood	33.05628	Hanna-Quinn criter		-3.398898
F-statistic	23.94549	Durbin-Watson stat		1.406629
Prob (F-Statistic)	0.000014			

Sumber: Data Pengolahan Mandiri

Dalam jangka panjang, hasil estimasi menunjukkan bahwa Dana Desa berpengaruh negatif dan signifikan terhadap jumlah penduduk miskin dengan koefisien $-0,102691$, yang mengindikasikan bahwa peningkatan alokasi Dana Desa mampu menurunkan kemiskinan melalui pembangunan infrastruktur, peningkatan layanan dasar, dan penguatan kapasitas masyarakat. Sementara itu, Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) memiliki pengaruh negatif namun tidak signifikan terhadap kemiskinan, sehingga belum dapat disimpulkan bahwa kualitas demokrasi di Indonesia memberikan dampak yang kuat dalam jangka panjang terhadap penurunan kemiskinan. Sebaliknya, Indeks Persepsi Korupsi (IPK) berpengaruh positif dan signifikan dengan koefisien $0,102505$, yang menunjukkan bahwa meningkatnya persepsi korupsi akan diikuti oleh peningkatan tingkat kemiskinan, karena korupsi dapat melemahkan efektivitas kebijakan publik, menghambat pembangunan, serta memperburuk distribusi sumber daya. Secara keseluruhan, hasil estimasi menunjukkan bahwa variabel-variabel tersebut memiliki kemampuan yang cukup kuat dalam menjelaskan variasi kemiskinan dalam jangka panjang.

Hasil Uji Asumsi Klasik

Hasil uji asumsi klasik menunjukkan bahwa model telah memenuhi seluruh persyaratan BLUE, sehingga estimasi yang dihasilkan bersifat tidak bias, konsisten, dan efisien. Uji normalitas menggunakan Jarque-Bera menunjukkan bahwa residual berdistribusi normal karena nilai probabilitas lebih besar dari $0,05$ baik pada model jangka pendek maupun jangka panjang. Uji heteroskedastisitas dengan Breusch-Pagan-Godfrey juga menunjukkan tidak adanya masalah heteroskedastisitas, ditandai dengan nilai probabilitas *Chi-Square* yang lebih besar dari $0,05$.

Selain itu, uji multikolinearitas memperlihatkan bahwa seluruh variabel memiliki nilai VIF di bawah 10, yang berarti tidak terdapat hubungan kuat antar variabel independen. Uji autokorelasi melalui Breusch-Godfrey LM Test juga menunjukkan hasil yang baik karena nilai probabilitas Chi-Square lebih besar dari 0,05, sehingga model terbebas dari masalah autokorelasi.

Hasil Pengujian Hipotesis

Hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa dalam jangka pendek, Dana Desa dan IDI berpengaruh signifikan terhadap penurunan kemiskinan, sedangkan IPK tidak berpengaruh signifikan. Namun dalam jangka panjang, Dana Desa dan IPK terbukti berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan, sementara IDI tidak signifikan. Secara simultan, ketiga variabel independen tersebut berpengaruh signifikan terhadap jumlah penduduk miskin baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Nilai R-squared sebesar 0,5827 pada jangka pendek dan 0,8467 pada jangka panjang menunjukkan bahwa model memiliki daya jelaskan yang cukup baik, terutama pada jangka panjang di mana variabel independen mampu menjelaskan sebagian besar variasi kemiskinan sebesar 84,67%.

Pembahasan

Pengaruh Dana Desa terhadap Kemiskinan

Hasil ECM menunjukkan bahwa Dana Desa berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang, dengan pengaruh yang lebih kuat dalam jangka panjang, yang berarti peningkatan Dana Desa secara konsisten mampu menurunkan jumlah penduduk miskin. Dalam jangka pendek, penurunan kemiskinan terjadi melalui efek multiplier dari program padat karya dan bantuan ekonomi yang meningkatkan pendapatan serta aktivitas ekonomi lokal, sedangkan dalam jangka panjang dampaknya lebih besar karena pembangunan infrastruktur dan peningkatan kapasitas masyarakat mendorong produktivitas dan kemandirian ekonomi. Hasil ini sejalan dengan penelitian Susilowati & Hadi (2020) serta Arifianto (2021) yang menemukan bahwa Dana Desa efektif menurunkan kemiskinan, meskipun terdapat penelitian lain yang menunjukkan hasil tidak signifikan akibat lemahnya tata kelola dan pengawasan, sehingga efektivitas Dana Desa sangat bergantung pada kualitas implementasi dan transparansi.

Pengaruh Indeks Demokrasi Indonesia terhadap Kemiskinan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Indeks Demokrasi Indonesia berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan dalam jangka pendek, namun tidak signifikan dalam jangka panjang, yang berarti demokrasi mampu menurunkan kemiskinan dalam jangka pendek tetapi belum memberikan dampak struktural jangka panjang. Secara kausal, dalam jangka pendek demokrasi meningkatkan responsivitas pemerintah melalui tekanan politik sehingga mendorong kebijakan pro-rakyat seperti bantuan sosial dan subsidi. Namun, dalam jangka panjang pengaruh tersebut melemah akibat kualitas institusi yang belum optimal, adanya praktik politik uang, serta kurangnya keberlanjutan kebijakan pembangunan. Hasil ini sejalan dengan Narayan et al. (2018) yang menyatakan bahwa demokrasi lebih efektif dalam jangka pendek, tetapi tidak sepenuhnya sejalan dengan Acemoglu et al. (2019) yang menemukan adanya dampak positif dalam jangka panjang, sehingga menunjukkan bahwa demokrasi di Indonesia masih bersifat prosedural dan belum sepenuhnya inklusif.

Pengaruh Indeks Persepsi Korupsi terhadap Kemiskinan

Hasil ECM menunjukkan bahwa Indeks Persepsi Korupsi tidak berpengaruh signifikan dalam jangka pendek, tetapi berpengaruh positif dan signifikan dalam jangka panjang terhadap kemiskinan, yang berarti korupsi dalam jangka panjang meningkatkan kemiskinan secara nyata. Dalam jangka pendek, dampak korupsi belum signifikan karena adanya mekanisme adaptasi masyarakat serta masih berjalannya program bantuan sosial meskipun tidak optimal, namun dalam jangka panjang korupsi berdampak struktural melalui kebocoran anggaran, menurunnya kualitas investasi publik, serta terhambatnya pertumbuhan ekonomi. Hasil ini sejalan dengan Gupta et al. (2002) dan Mauro (1998) yang menyatakan bahwa korupsi meningkatkan kemiskinan, meskipun terdapat penelitian lain yang menunjukkan hasil tidak signifikan dalam jangka pendek karena efeknya bersifat akumulatif, sehingga menegaskan bahwa dampak korupsi lebih dominan dalam jangka panjang.

Pengaruh Ketiga Variabel terhadap Kemiskinan

Secara simultan, Dana Desa, Indeks Demokrasi Indonesia, dan Indeks Persepsi Korupsi berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang, dengan pengaruh yang semakin kuat dalam jangka panjang, yang menunjukkan bahwa kemiskinan dipengaruhi oleh kombinasi faktor ekonomi, politik, dan tata kelola. Secara kausal, dalam jangka pendek Dana Desa mendorong aktivitas ekonomi, demokrasi meningkatkan responsivitas kebijakan, dan korupsi memengaruhi efektivitas program, sedangkan dalam jangka panjang interaksi ketiganya menentukan keberhasilan pengentasan kemiskinan secara struktural. Hasil ini menegaskan bahwa efektivitas Dana Desa sangat dipengaruhi oleh kualitas demokrasi dan tingkat korupsi, sehingga tanpa tata kelola yang baik dampak positif Dana Desa dapat berkurang, dan oleh karena itu sinergi antara kebijakan fiskal, penguatan demokrasi, serta pemberantasan korupsi menjadi kunci dalam menurunkan kemiskinan secara berkelanjutan (Wahyudin, 2018).

Kesimpulan

Penelitian ini menganalisis pengaruh Dana Desa, Indeks Demokrasi Indonesia (IDI), dan Indeks Persepsi Korupsi (IPK) terhadap kemiskinan di Indonesia periode 2008–2024 dengan metode Error Correction Model (ECM). Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dana Desa berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang, dengan dampak yang lebih kuat dalam jangka panjang melalui pembangunan dan penguatan ekonomi desa. IDI berpengaruh negatif dan signifikan dalam jangka pendek, namun tidak signifikan dalam jangka panjang, yang menunjukkan bahwa kualitas demokrasi belum sepenuhnya berdampak berkelanjutan. Sementara itu, IPK tidak signifikan dalam jangka pendek, tetapi berpengaruh positif dan signifikan dalam jangka panjang, mencerminkan dampak kumulatif korupsi terhadap peningkatan kemiskinan. Secara simultan, ketiga variabel berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan dan menunjukkan bahwa faktor ekonomi, politik, dan tata kelola saling berinteraksi. Oleh karena itu, diperlukan penguatan tata kelola Dana Desa, peningkatan kualitas demokrasi yang lebih substantif, serta pemberantasan korupsi secara sistemik. Penelitian selanjutnya disarankan memperluas cakupan wilayah, menambahkan variabel relevan, dan menggunakan metode analisis lanjutan.

Referensi

- Acemoglu, D., Naidu, S., Restrepo, P., & Robinson, J. A. (2019). Democracy does cause growth. *Journal of Political Economy*, 127(1), 47–100.
- ACLK KPK. (2022). Indeks persepsi korupsi.
- Afifi, M., & Singandaru, A. B. (2024). Analisis pengelolaan alokasi dana desa (ADD) dalam upaya meningkatkan pembangunan desa (studi kasus: Desa Suwangi, Kecamatan Sakra, Kabupaten Lombok Timur). *Jurnal Konstanta: Ekonomi Pembangunan*, 3(1), 1–23.
- Arifianto, A. (2021). Dampak dana desa terhadap pemberdayaan ekonomi masyarakat desa. *Jurnal Kebijakan Publik*, 12(1), 45–58.
- Badan Pusat Statistik. (2020). Penghitungan dan analisis kemiskinan makro Indonesia tahun 2020.
- Badan Pusat Statistik. (2024a). Memahami perbedaan angka kemiskinan versi Bank Dunia dan BPS.
- Badan Pusat Statistik. (2024b). Profil kemiskinan di Indonesia September 2024.
- Badan Pusat Statistik. (2025). Indeks demokrasi Indonesia.
- Basuki, A. T. (2015). Regresi model PAM, ECM, dan data panel dengan EViews 7.
- Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan. (2021). Peran dana desa dalam pemulihan ekonomi nasional dan penanganan COVID-19.
- Freedom House. (2024). Freedom in the world 2024: Democracy under threat.
- Gupta, S., Davoodi, H., & Alonso-Terme, R. (2002). Does corruption affect income inequality and poverty? *Economics of Governance*, 3(1), 23–45.
- Halim, A. R., & Taryani, A. (2023). Pengelolaan dana desa dan dampaknya terhadap indeks desa membangun di Nusa Tenggara Timur. *Jurnal Manajemen Perbendaharaan*, 4(1), 51–71. <https://doi.org/10.33105/jmp.v4i1.486>
- Kementerian Dalam Negeri. (2020). Strategi penguatan demokrasi Indonesia.
- Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi. (2020). Pembangunan daerah tertinggal dan transmigrasi.

- Kementerian Keuangan. (2020). Dana desa: Pengertian, sumber dana, penyaluran dana, dan prioritasnya.
- Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah. (2020). Dana desa menurunkan angka kemiskinan dan pengangguran.
- Mauro, P. (1998). Corruption and the composition of government expenditure. *Journal of Public Economics*, 69(2), 263–279.
- Narayan, P. K., Narayan, S., & Smyth, R. (2018). The effect of democracy on economic growth and poverty. *Economic Modelling*, 72, 449–458.
- Susilowati, E., & Hadi, S. (2020). Pengaruh dana desa terhadap penurunan kemiskinan di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 18(2), 123–135.
- Transparency International. (2020). Corruption perceptions index 2020: Technical methodology note.
- UNDP. (2019). Human development report 2019: Beyond income, beyond averages, beyond today.
- Wahyudin, Y. (2018). Analisis kemiskinan dalam kaitannya dengan indeks demokrasi ekonomi. *Jurnal Ilmu Ekonomi Mulawarman*. <https://journal.feb.unmul.ac.id/index.php/JIEM/article/view/2403>
- World Bank. (2018). Poverty and shared prosperity 2018: Piecing together the poverty puzzle.